

**OPINI PUBLIK TERHADAP SANKSI HUKUMAN
CAMBUK DI DINAS SYARIAT ISLAM BAGI
PERATURAN DAERAH (QANUN) DI
PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

Oleh:

FONCHO RAMADHAN ESA
NPM : 1403110175

Program Studi Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : Public Relation



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **FONCHO RAMADHAN ESA**
N P M : 1403110175
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Pada hari, tanggal : Rabu, 17 Oktober 2018
Waktu : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Hj. RAHMANITA GINTING, Ph.D (.....)
PENGUJI II : NUR RAHMA AMINI, S.Ag., M.A (.....)
PENGUJI III : Dr. ANANG ANAS AZHAR, M.A (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Drs. ZULFAHMI, M.Kom

Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **FONCHO RAMADHAN ESA**
N P M : 1403110175
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : **OPINI PUBLIK TERHADAP HUKUMAN
CAMBUK DI DINAS SYARI'AT ISLAM
BAGI PERATURAN DAERAH (QANUN) DI
PROVINSI ACEH**

Medan, 02 Oktober 2018

PEMBIMBING



Dr. ANANG ANAS AZHAR, M.A

DISETUJUI OLEH,
KETUA PROGRAM STUDI



NURHASANAH NASUTION, S.Sos., M.I.Kom



DEKAN,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

UUSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FONCHO RAMADHAN ESA

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya FONCHO RAMADHAN ESA, NPM 1403110175, menyatakan dengan sesungguhnya:


1. Saya yang menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu, atau memplagiat, meniplak dan mengambil karya orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Oktober 2018

Yang menyatakan



FONCHO RAMADHAN ESA

ABSTRAK

OPINI PUBLIK TERHADAP SANKSI HUKUMAN CAMBUK DI DINAS SYARIAT ISLAM BAGI PERATURAN DAERAH (QANUN) DI PROVINSI ACEH

OLEH :

FONCHO RAMADHAN ESA

1403110175

Opini publik identik dengan pengertian kebebasan, keterbukaan dalam mengungkapkan ide, pendapat, keinginan, keluhan, kritik yang membangun dan kebebasan dalam berpendapat. Dengan kata lain, opini publik merupakan efek dari kebebasan dalam mengungkapkan ide dan pendapat. Dalam hakikatnya sebuah opini publik terjadi karena adanya sesuatu yang berbeda di mata masyarakat dan perbedaan tersebut bisa timbul karena ada pembaharuan peraturan, seperti sanksi hukuman cambuk yang berada di Provinsi Aceh apabila ada masyarakat yang melakukan sesuatu yang melanggar peraturan daerah tersebut akan diberi hukuman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana opini publik itu dapat mempengaruhi kebijakan tentang adanya keberadaan sebuah sanksi hukuman cambuk di Provinsi Aceh. Karena sebuah opini publik dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat apakah sanksi hukuman cambuk dapat diterima apa tidak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan memakai rumus korelasi product moment, dimana korelasi product momen merupakan suatu alat uji statistik yang digunakan untuk menguji antara dua hubungan variabel x dan y yang berfungsi untuk mencari hubungan diantar kedua variabel tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat opini publik (x) dan sanksi hukuman cambuk (y) diperoleh nilai korelasi sederhana variabel x (335) dan variabel y (1024). Diperoleh r_{xy} sebesar 0,300 yang merupakan hasil dari nilai korelasi variabel x dan variabel y. Dari nilai korelasi yang didapat yaitu 0,300 (0,20 – 0,399), maka tingkat hubungan korelasi yang diperoleh kuat. Hasil dari yang diperoleh merupakan hal yang penting untuk dinilai, karena dengan penggunaan rumus dan penghitungan yang tepat maka akan didapatkan perolehan angka yang menjadi nilai akhir dalam pengambilan angket/kuesioner.

Kata Kunci: Opini Publik, Hukuman Cambuk, Syariat Islam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini.

Skripsi saya yang berjudul “OPINI PUBLIK TERHADAP SANKSI HUKUMAN CAMBUK DI DINAS SYARIAT ISLAM BAGI PERATURAN DAERAH (QANUN) DI PROVINSI ACEH” diajukan penulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang strata 1 (S-1) Jurusan ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Berjuang tidak terlepas dari suntingan semangat dari orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Pada kesempatan ini penulis sertakan ucapan terima kasih yang tak terhingga yang sangat istimewa untuk kedua orang tua saya Ayahanda **Irawansyah** dan Ibunda **Yursi Ferra Bahari** yang saya sayangi dan cintai yang selalu mendoakan penulis, membimbing, serta memberi motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini selesai. Serta Adik-adik saya **M. Gusti Rayhan Putra Irawan** dan **Gavin Demas Afgannabiyu**. Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.sos., MSP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Nurhasanah Nasution, S.Sos, M.I.Kom, selaku Ketua Prodi Jurusan Ilmu Komunikasi.
4. Bapak Dr. Anang Anas Azhar., M.A, selaku Pembimbing penulis yang bersedia memberi masukan dan arahan positif dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Said Anwar SHI, selaku Kabid Bina Hukum dan Sumber Daya Syariat Islam Aceh Tamiang yang dapat menyediakan waktu penulis untuk riset di Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Tamiang.
6. Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Tamiang sebagai tempat penulis akan melakukan riset.
7. Seluruh dosen di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mendidik dan membimbing penulis.
8. Teristimewa kepada orang tua dan keluarga yang telah banyak memberikan dukungan serta bantuan selama penulis melakukan penelitian hingga saat ini dan yang terpenting doa yang tidak pernah putus dari kedua orang tua penulis untuk kesuksesan penulis dalam segala bidang.
9. Teman-teman sepermainan di Satkopdar, terkhusus saudara yang baru kenal di semester 1 Fatur, Devi, Bos Lutfi, Wibi, Iman, dll. yang sudah dianggap saudara sendiri yang selalu memberikan support agar untuk tidak menyerah. Dan seorang perempuan istimewa yang tidak bisa saya sebut namanya yang sudah memberi saya semangat dan motivasi.

10. Huswatun Hasanah insya'Allah S.I.Kom , seorang yang spesial yang selalu ada dalam hati penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Dan pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam laporan skripsi ini sehingga penulis bersedia menerima saran dan kritikan dari pihak yang membacanya.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan skripsi ini dapat berguna bagi yang membacanya juga dapat menjadi referensi yang baik untuk pembuatan laporan skripsi kedepannya, Terima kasih.

Medan,03 Oktober 2018
Penulis,

Foncho Ramadhan Esa

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Pengesahan	
Abstrak	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Pembatasan Masalah	4
1.4. Tujuan Penelitian.....	5
Manfaat Penelitian.....	5
1.5. SistematikaPenulisan.....	5
BAB II. URAIAN TEORITIS	7
2.1. Opini	7
2.1.1. Pengertian Opini	7
2.1.2. Unsur-Unsur Opini	8
2.1.3. Ciri-Ciri Opini	8
2.1.4. Macam-Macam Opini	9
2.2.Publik	10
2.2.1. Pengertian Publik	10

2.2.2. Jenis-Jenis Publik	12
2.3. Opini Publik	13
2.3.1. Pengertian Opini Publik	13
2.3.2. Proses Pembentukan Opini Publik	15
2.3.3. Pengaruh Opini Publik	18
2.4. Komunikasi Massa	20
2.4.1. Pengertian Komunikasi Massa	20
2.4.2. Dampak Komunikasi Massa	21
2.4.3. Unsur-Unsur Komunikasi Massa	22
2.4.4. Efek Komunikasi Massa	24
2.4.5. Fungsi Komunikasi Massa	25
2.5. Hukum	27
2.5.1. Pengertian Hukum	27
2.5.2. Hukum Uqubah Cambuk	28
2.6. Hipotesis	31
BAB III. METODE PENELITIAN	32
3.1. Jenis Penelitian.....	32
3.2. Kerangka Konsep	33
3.3. Definisi Konsep.....	33
3.4. Definisi Operasional.....	34
3.5. Populasi dan Sampel	35
3.5.1. Populasi.....	35
3.5.2. Sampel.....	35

3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.7. Teknik Analisis Data.....	37
3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
BAB IV. ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN	39
4.1. Hasil Penelitian	39
4.1.1. Analisis Tabel Tunggal	39
4.1.2. Analisis Data	41
4.1.3. Uji Statistik.....	51
4.1.4. Uji Korelasi Product Moment	55
4.1.5. Uji Taraf Signifikan	61
4.1.6. Uji thitung dan ttabel.....	61
4.1.7. Membandingkan Nilai thitung dan ttabel.....	63
4.2. Pembahasan.....	63
BAB V. PENUTUP.....	65
5.1. Kesimpulan	65
5.2. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Kerangka Konseptual Penelitian	33
Tabel 3.2. Definisi Operasional	32
Tabel 4.1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	40
Tabel 4.2. Distribusi Responden Berdasarkan Usia	40
Tabel 4.3. Distribusi Jawaban Responden Pertanyaan Angket No.1	41
Tabel 4.4. Distribusi Jawaban Responden Pertanyaan Angket No.2	42
Tabel 4.5. Distribusi Jawaban Responden Pertanyaan Angket No.3	43
Tabel 4.6. Distribusi Jawaban Responden Pertanyaan Angket No.4	44
Tabel 4.7. Distribusi Jawaban Responden Pertanyaan Angket No.5	44
Tabel 4.8. Distribusi Jawaban Responden Pertanyaan Angket No.6	45
Tabel 4.9. Distribusi Jawaban Responden Pertanyaan Angket No.7	46
Tabel 4.10. Distribusi Jawaban Responden Pertanyaan Angket No.8	47
Tabel 4.11. Distribusi Jawaban Responden Pertanyaan Angket No.9	48
Tabel 4.12. Distribusi Jawaban Responden Pertanyaan Angket No.10	48
Tabel 4.13. Distribusi Jawaban Responden Pertanyaan Angket No.11	49
Tabel 4.14. Distribusi Jawaban Responden Pertanyaan Angket No.12	50
Tabel 4.15. Distribusi Jawaban Responden Pertanyaan Angket No.13	51
Tabel 4.16. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Variabel (X)	52
Tabel 4.17. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Variabel (Y)	54
Tabel 4.18. Distribusi Tabel Perhitungan Untuk Mencari Nilai Korelasi.....	55
Tabel 4.19. Distribusi Tabel Mencari Nilai Korelasi Sederhana	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum diciptakan oleh manusia untuk mengatur kehidupannya sendiri agar dapat menciptakan keserasian, ketertiban, dan ketentraman dalam pergaulan antar masyarakat saat saling berinteraksi. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Dalam kehidupan bernegara, salah satu yang harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan ini diyakini tidak hanya disebabkan dianutnya paham Negara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis kecenderungan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang kearah masyarakat modern.

Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia (NKRI), yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dengan pemberian otonomi khusus, agar pemerintah daerah lebih leluasa mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah merupakan salah satu upaya dari negara untuk merealisasikan pembangunan yang merata serta sebagai bentuk jaminan akan perlindungan nilai-nilai yang ada pada masyarakat setempat. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Indonesia memberi otonomi khusus bagi Provinsi Istimewa Aceh, yang meliputi semua kewenangan pemerintah, kecuali kewenangan dalam hubungan luar negeri, pertahanan, terhadap gangguan eksternal, dan moneter. Provinsi Aceh dikenal dengan Kota Serambi Mekah. Dimana dalam sejarah Aceh yang panjang, masyarakat Aceh telah menempatkan hukum (Syariat) Islam sebagai pedoman hidupnya. Penghayatan terhadap hukum Islam melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut terus berkembang dan hidup dalam kehidupan masyarakat Aceh yang kemudian terakumulasi dalam bentuk-bentuk hadih-hadih maja (kata-kata bijak) seperti: "*Adat bak poteu meureuhoem, hukoem bak syiah kualala, Qanun bak putroe phang, reusam bak lakseumana.*" Yang artinya hukum adat di tangan pemerintah dan hukum agama atau syariat ada di tangan para ulama. "*Adat ngen hukoem lagee zat ngen sifeut.*" Artinya hukum dan adat itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan rakyat Aceh. Ungkapan tersebut merupakan pencerminan bahwa Syariat Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh melalui peran ulama sebagai pewaris para Nabi.

Hukuman yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama Islam, yaitu ajaran Syariat Islam yang di implementasikan dalam Qanun yang dibuat oleh Pemerintah Aceh dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Aceh untuk

melaksanakan syariat islam bagi pemeluknya di Aceh (Al Yasa Abu Bakar, 2004:61).

Dalam lingkup Provinsi Aceh, penyebutan Qanun dilakukan sebagai pengganti penyebutan Peraturan Daerah. Salah satu unsur dari pengaturan Syariat Islam dalam aturan qanun adalah adanya unsur pidana islam (*jinayat*). Selain itu, dengan ditetapkannya lembaga peradilan yang berwenang mengadili dan menghukum pelaku pelanggaran Syariat Islam, lembaga tersebut adalah Mahkamah Syari'ah. Penyebutan Qanun ini dikeluarkan sebagai upaya masyarakat Aceh mencitrakan diri sebagai wilayah yang benar-benar menerapkan Syariat Islam dalam setiap sendi kehidupannya.

Dalam pandangan masyarakat bahwa hukum ini menjadikan suatu penilaian ataupun opini baik dalam daerah ataupun diluar daerah. Opini masyarakat ataupun publik bisa menjadikan nilai untuk hukuman bagi masyarakat yang melanggar syariat Islam Aceh sebagai otonomi daerah. Menurut Nugroho (2004:18) jika suatu opini publik yang dianggap kompeten atau dapat memenuhi syarat opini publik dalam arti khusus, apabila ada fakta yang dijadikan tolak ukur perumusan opini publik, yakni adanya unsur penelitian baik dan buruk dari masyarakat, menyangkut sebuah isu yang ada didalam kehidupan bersama, bersifat rasional, syarat-syarat sebagai opini publik dalam arti khas tersebut bisa ditinjau dari fakta, nilai-nilai dan kompetensinya.

Dari penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa Aceh memiliki wewenang dalam mengatur aturan yang berlaku di daerahnya sendiri sesuai dengan kesepakatan masyarakat terhadap adat setempat. Qanun Syariat Islam di

Aceh dibuat untuk mengurangi tingkat kejahatan yang meresahkan warga dan mengurangi dosa dari pelaku kejahatan. Hukum cambuk yang dinilai terlalu keras nyatanya dapat memberikan efek jera kepada pelanggar meskipun mereka harus menahan rasa sakit dari cambukan. Segala prosesnya sudah diatur dalam tatanan perundang-undangan di Aceh dan tidak melanggar aturan hukum internasional seperti hak asasi manusia karena telah disahkan oleh negara Indonesia.

Pandangan masyarakat terhadap kerasnya hukuman cambuk yang bertentangan dengan hak asasi manusia dapat diperjelas arahnya dengan mengkaji lagi aturan undang-undang yang berlaku sesuai dengan kesepakatan masyarakat Aceh. Tidak ada hal yang disengajai untuk dilakukan tanpa ada payung hukum untuk mengadili perbuatan. Eksistensi hukum cambuk di Aceh tetap terus dipertahankan demi tegaknya agama Islam di tanah Serambi Mekkah.

1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari latarbelakang masalah di atas, maka diperoleh perumusan masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana opini publik terhadap sanksi hukuman cambuk di dinas Syariat Islam bagi peraturan daerah (Qanun) di Provinsi Aceh?

1.3. Pembatasan Masalah

Dari masalah yang telah diidentifikasi maka penulis menetapkan batasan masalah sebagai batasan kajian penelitian untuk mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis akan membatasi masyarakat yang berada di Desa Sriwijaya Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui opini publik terhadap sanksi hukuman cambuk di dinas Syariat Islam bagi peraturan daerah (Qanun) di Provinsi Aceh.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

- 1) Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan teoretis tentang opini publik.
- 2) Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian peneliti tentang opini publik/pendapat masyarakat tentang sanksi hukuman cambuk di dinas Syariat Islam bagi peraturan daerah (Qanun) di Provinsi Aceh.
- 3) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada berbagai pihak terkait dalam rangka menangani masalah pendapat masyarakat tentang hukum sambuk yang berada di Provisini Aceh.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I: Merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, pembatasan masalah, perusumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II: Merupakan uraian teoritis yang menguraikan tentang opini publik terhadap sanksi hukuman cambuk.

- BAB III: Merupakan persiapan dari pelaksanaan penelitian yang menguraikan tentang metodologi penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, operasionalisasi konsep, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penulisan serta sistematika penulisan.
- BAB IV: Merupakan pembahasan yang menguraikan tentang ilustrasi penelitian, hasil dan pembahasan.
- BAB V: Merupakan penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORETIS

Berdasarkan masalah yang akan dikaji, dalam suatu penelitian diperlukan suatu keterangan penjelasan untuk menegaskan bahwasanya masalah ini benar adanya, maka di kemukakan teori. Teori ini di kemukakan sebagai landasan berfikir untuk memberikan solusi dari masalah yang ada dalam suatu penelitian.

2.1. Opini

2.1.1. Pengertian Opini

Opini sering disebut dengan pendapat. Opini atau pendapat merupakan suatu sikap pikiran seseorang terhadap suatu persoalan. Menurut Nurhadi (2003:7) pendapat adalah mengungkapkan sesuatu secara subjektif, berdasarkan pemikiran pribadi, kebenarannya kadang tidak dapat dibuktikan. Menurut Frazier Moore (2004:13) Opini lebih kuat dari pada sebuah kesan tetapi lebih lemah dari pada pengetahuan yang positif. Opini merupakan suatu kesimpulan yang ada dalam pikiran dan belum dikeluarkan untuk di perdebatkan. Opini artinya pendapat atau pandangan tentang sesuatu. Karena itu, opini bersifat subjektif karena pandangan atau penilaian seseorang dengan yang lainnya selalu berbeda. Jadi, kendati faktanya sama, namun ketika orang beropini, antara orang yang satu dengan yang lainnya memperlihatkan adanya perbedaan (Abdullah, 1999: 14).

Berdasarkan pendapat opini di atas, penulis mengacu pada pendapat Abdullah, yaitu opini artinya pendapat atau pandangan tentang sesuatu. Karena

itu, opini bersifat subjektif karena pandangan atau penilaian seseorang dengan yang lainnya selalu berbeda.

2.1.2. Unsur-Unsur Opini

Opini mempunyai unsur sebagai molekul opini, yaitu (Sunarjo, 1997:89)

1) Kepercayaan tentang sesuatu

Kepercayaan adalah sistem penyimpanan yang berisi pengalaman kita dimasa lalu, meliputi pikiran, ingatan, dan interpretasi terhadap sesuatu.

2) Apa sebenarnya dirasakan seseorang

Suatu prediposisi (keadaan yang mudah terpengaruh) terhadap seseorang, ide atau obyek yang berisi komponen-komponen pengertian, perasaan atau emosi, dan perilaku, dimana komponen ini juga merupakan komponen dari sikap.

3) Persepsi

Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan untuk memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita (Mulyana, 2003:167).

2.1.3. Ciri-Ciri Opini

Menurut Suyono (2007: 158) ciri-ciri opini dirincikan sebagai berikut:

- 1) dari segi isi opini sesuai atau tidak sesuai dengan kenyataan bergantung pada kepentingan tertentu,
- 2) dari segi kebenaran opini dapat benar atau salah bergantung data pendukung atau konteksnya,
- 3) dari segi pengungkapan opini cenderung argumentatif dan persuasif,

- 4) dari segi penalaran opini cenderung deduktif

2.1.4. Macam-Macam Opini

Macam-macam opini dapat dibagi dalam beberapa bagian, yaitu pemikiran, harapan, tanggapan, ide, gagasan, usul, saran, kritik, keinginan, penolakan, persetujuan, pemecahan suatu masalah yang disampaikan dan lain-lain. Opini biasanya disertai oleh argumen atau alasan-alasan tertentu yang mendukung pemikirannya, opini juga biasanya dipadukan dengan kata-kata seperti: (1) seharusnya, (2) seandainya, (3) sebaiknya, (4) mungkin, (5) menurut saya atau pendapat saya, (6) jika, (7) sebab, (8) penyebab, (9) siapa lagi, dan (10) pujian (Nurhadi, 2003: 7). Berikut contoh penggunaan kata-kata pada opini:

- 1) Seharusnya pembelajaran diarahkan untuk menciptakan atau mengkondisikan sikap dan pola hidup anak didik sehingga selaras dengan kehidupan masyarakat secara luas.
- 2) Seandainya saja sekolah di negeri ini dibuat serba gratis pasti pendidikan menjadi lebih maju.
- 3) Di Bandarlampung, beberapa Sekolah Dasar belum memiliki perpustakaan sekolah. Sebaiknya perpustakaan sekolah segera dibangun agar siswa memperoleh banyak pengetahuan dari perpustakaan tersebut.
- 4) Mungkin Retno telah sampai di rumah dengan sambutan yang hangat dari keluarganya.
- 5) Menurut saya sebesar apa pun musibah yang menerpa, esoknya kita akan lupa dan tidak mengambil pelajaran, bagaimana musibah itu menjadi pelajaran agar tidak terulang lagi di kemudian hari.

- 6) Tidak heran jika seseorang telah mengikuti dan menjalani proses pendidikan, maka kualitas emosi dan pengetahuannya lebih baik dari yang tidak berpendidikan.
- 7) Menurut saya sebesar apa pun musibah yang menerpa, esoknya kita akan lupa dan tidak mengambil pelajaran, bagaimana musibah itu menjadi pelajaran agar tidak terulang lagi di kemudian hari.
- 8) Sebab belum ada ikatan dan komitmen yang sah untuk saling bertanggung jawab satu sama lain.
- 9) Penyebab kanker biasanya tidak dapat diketahui secara pasti karena penyebab kanker dapat merupakan gabungan dari sekumpulan faktor, genetik dan lingkungan.
- 10) Siapa lagi yang ingin mendapatkan keuntungan sebesar ini.
- 11) Sekali lagi, produk ini memang cukup bagus, selain harga yang ringan juga menawarkan perlindungan yang cukup lengkap.

2.2. Publik

2.2.1. Pengertian Publik

Publik bukan merupakan kata yang asing bagi kita. Hampir di berbagai media kita melihat dan mendengar kata public. Kata public sebenarnya identik dengan khalayak atau masyarakat, namun banyak definisi public yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya akan dikemukakan berikut ini:

- 1) Publik didefinisikan oleh Cutlip, Center dan Broom (Cutlip, 2006:22) sebagai unit social aktif yang terdiri dari semua pihak yang terlibat

mengenali problem bersama yang akan mereka cari solusinya secara bersama-sama.

- 2) Kriyantono (2012) mendefinisikan public sebagai sekumpulan orang/kelompok dalam masyarakat yang memiliki kepentingan atau perhatian yang sama terhadap suatu hal.
- 3) Menurut Gruth & Marsh dalam Estaswara (2012) mendefinisikan public sebagai: *“Any group of people who share common interests or values in a particular situations especially interests or values they might be willing act upon”*. Dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan public adalah setiap kelompok orang memiliki minat atau nilai-nilai bersama dalam situasi tertentu, terutama kepentingan atau nilai-nilai mereka mungkin bertindak atas kesediaan.
- 4) Jefkins (2003) mendefinisikan public sebagai kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan organisasi, baik secara internal maupun eksternal.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan public pada dasarnya adalah sekumpulan orang yang memiliki kepentingan yang sama untuk tertarik dalam aktivitas dan perilaku organisasi atau perusahaan. Dengan demikian, publik adalah sejumlah orang yang berminat dan merasa tertarik terhadap suatu masalah dan berhasrat mencari suatu jalan keluar dengan mewujudkan tindakan yang konkret.

2.2.2. Jenis-Jenis Publik

Berikut adalah jenis-jenis publik:

1) Non Publik

Mereka yang tidak mempengaruhi atau terpengaruh oleh organisasi. Sebagai contoh seorang pengecer yang terdapat di Bandung tidak akan memiliki pengaruh dan tidak akan dipengaruhi oleh publik yang ada di Bogor.

2) Publik laten

Kelompok yang menghadapi masalah tertentu sebagai akibat tindakan perusahaan, namun mereka tidak mengetahui akibat tersebut sebagai produk perusahaan. Sebagai contoh Sebuah perusahaan tertentu yang melakukan perluasan bisnis akan menambah kemacetan jalur lalu lintas setempat, namun pemerintah lokal tersebut tidak menyadarinya.

3) Publik Sadar

Mereka yang mengetahui bahwa terdapat masalah. Sebagai contoh Perusahaan yang akan memperluas bisnis di atas di ketahui oleh pemerintah lokal setempat melalui surat kabar yang memberitakan perluasan perusahaan tersebut.

4) Publik Apatis

Publik yang pada dasarnya tidak peduli dengan seluruh permasalahan dan secara umum tidak termasuk publik.

5) Publik Aktif

Kelompok melakukan sesuatu terhadap masalah tertentu. Sebagai contoh masyarakat yang melakukan pemblokiran jalan di mana perusahaan yang memperluas jaringan bisnis tersebut berada. (/pengertian-jenis-ciri-dan-karakteristik.html/ diakses pada tanggal 10-Mei-2018).

2.3. Opini Publik

2.3.1. Pengertian Opini Publik

Opini adalah pendapat atau pandangan yang sifatnya subjektif mengenai suatu masalah atau peristiwa yang dituangkan dalam tulisan di media massa atau dikemukakan kepada wartawan yang mewawancarainya. Dalam dunia jurnalistik, opini termasuk dalam kategori fakta. Karena itu, opini disebut juga fakta dalam pemikiran (*fact in idea*) dan menjadi bahan berita (Asep Syamsul, 2008:95). Opini artinya pendapat publik yang berarti orang banyak dan proses bagaimana publik mengemukakan pendapatnya dengan tidak ada paksaan dengan tujuan yang sama dan diekspresikan oleh sejumlah orang penting tentang suatu isu terhadap kepentingan umum. Jika memandang tentang opini publik maka kekuatannya akan semakin membesar diseluruh dunia setelah komunikasi massa menjadi fenomena global. Opini publik merefleksikan proses dinamis dan komunikasi antar personla serta media tentang isu-isu dikalangan kelompok orang-orang yang mempunyai kapasitas untuk bertindak dengan cara yang sama sebagai bentuk penyampain pendapat (Dani Vardiansyah, 2004:127).

Opini publik adalah penilaian, pendapat, atau pandangan orang banyak yang tidak teorganisasi, tersebar dimana-mana dan karena kesamaan pandangan

terhadap sesuatu mereka dapat bergerak serentak dan bersatu-padu menyikapi sesuatu tersebut. Opini publik yang tercipta dimasyarakat bisa menjadi sanksi sosial atau tekanan psikologis. Misalnya, jika sebuah permasalahan hukum cambuk yang berada di Provinsi Aceh karena adanya kontak sosial kaum laki-laki dan perempuan yang belum sahnya sehingga menjadi opini publik, pembelaan apapun dari kelompok itu akan sulit menghapus sikap sinis masyarakat terhadap kelompok massa. Opini umum biasanya berdasarkan nilai dan norma-norma yang berwujud sanksi-sanksi sosial, sehingga ada orang yang mempersoalkannya berarti mempersoalkan kaidah-kaidah sosial yang pada dasarnya sudah tidak dapat dipersoalkan lagi karena telah diterima menurut tradisi dan adat istiadat (Asep Syamsul, 2008:95). Doob berpendapat bahwa opini publik itu bersifat tetap latent (terpendam) dan baru memperlihatkan sifat yang aktif apabila issue itu timbul dalam suatu kelompok atau lingkungan. Suatu issue itu timbul kalau terdapat konflik, kegelisahan atau frustrasi (Soemirat, Ardianto, 2003:104).

Dengan kata lain opini merupakan iklim sosial dimana sebagian besar bersum ber pada opini persona, opini kelompok demikian juga opini publik. Walaupun opini ini adalah opini yang menetap dan bersifat statis, namun apabila ada suatu peristiwa yang cukup menggoncangkan ataupun rangsangan yang hebat dari luar sehingga menimbulkan masalah yang kontroversial maka akan mampu menggoyahkan opini umum menjadi opini publik yang dinamis, bahkan tidak sampai disitu saja karena opini publik tersebut dapat agresif.

Akan tetapi sebaliknya opini publik yang menetap dan solid/padat atau opini publik yang mantap lama kelamaan akan meresap dan pada akhirnya menjadi nilai dan norma-norma dan kemudian dapat dirasakan sebagai suatu iklim sosial dan selanjutnya akan menjadi opini umum.

2.3.2. Proses Pembentukan Opini Publik

Faktor-faktor yang dapat membentuk opini tersebut, menurut D.W. Rajecki, dalam bukunya *Attitude, themes and Advance*, (1982), yaitu mempunyai tiga komponen, yang dikenal dengan istilah *ABCs of Attitude*, penjelasannya sebagai berikut:

1) Komponen A: *Affect* (perasaan atau emosi)

Komponen ini berkaitan dengan rasa senang, suka, sayang, takut, benci, sedih, dan kebanggan hingga muak atau bosan terhadap sesuatu, sebagai akibat setelah merasakannya atau timbul setelah melihat dan mendengarkannya. Kemudian komponen efektif tersebut merupakan evaluasi berdasarkan perasaan seseorang yang secara emotif (aspek emosional) untuk menghasilkan penilaian, yaitu: "baik atau buruk".

2) Komponen B: *behaviour* (tingkah laku)

Komponen ini lebih menampilkan tingkahlaku atau perilaku seseorang, misalnya bereaksi untuk memukul, menghancurkan, menerima, menolak, mengambil, membeli dan lain sebagainya. Jadi merupakan komponen untuk menggerakkan seseorang secara aktif (*action element*) untuk melakukan "tindakan atau berperilaku" atas suatu reaksi yang sedang dihadapinya.

3) Komponen C: Cognition (pengertian atau nalar)

Komponen kognisi ini berkaitan dengan penalaran seseorang untuk menilai suatu informasi, pesan fakta dan pengertian yang berkaitan dengan pendiriannya. Komponen ini menghasilkan penilaian atau pengertian dari seseorang berdasarkan rasio atau kemampuan penalarannya. Artinya kognitif tersebut merupakan aspek kemampuan intelektualitas seseorang yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. (dalam Ruslan, 2003:61).

Menurut Renald Kasali, dalam bukunya Manajemen Publik Relations Konsep dan Aplikasinya di Indonesia (2003:56), bahwa perkembangan opini individual menjadi opini publik, baik bersifat mendukung mau mendatang, secara garis besarnya melalui beberapa tahapan-tahapan:

1) Proses Waktu

Memerlukan proses waktu untuk membentuk *consensus* atas masing-masing individu, dan berapa lama waktu yang diperlukan sangat tergantung pada unsur emosi, kesamaan persepsi, kepercayaan atas suatu isu berita yang tengah berkembang, tingkat pengalaman yang sama dan hingga tindakan yang diambil oleh narasumber berita. Waktu yang menjadi ketepatan dalam penyampaiannya juga memerlukan pemikiran untuk menciptakan suatu opini public yang sempurna.

2) Cakupan (luasan publik)

Konsensus atas masing-masing individu terhadap pembentukan opini publik, biasanya berawal dari segmen yang paling minor (kecil), kemudian cepat atau lambat menjadi *segmen mayor* atau berkoalisi dengan kelompok yang lebih luas.

3) Pengalaman masa lalu

Khalayak (*audience*) pada umumnya pernah memiliki pengalaman terhadap isu tertentu yang sedang dibicarakan (diekspos). Makin intensif hubungan antara *audience* dan isu sebagai obyek pembicaraan, maka semakin banyak kesamaan pengalaman yang akan dirasakan oleh khalayak tersebut menjadi suatu *consensus*.

4) Tokoh (aktor pelaku)

Hampir setiap kasus termasuk didalamnya kasus-kasus kriminal yang terekspos keluar oleh media massa, sudah pasti akan selalu ada "tokohnya" (actor), baik bersifat intelektual, politisi, eksekutif, tokoh keagamaan dan masyarakat yang dapat membentuk *consensus* masyarakat.

5) Media massa sebagai pembentuk opini publik

Berita yang ditampilkan atau diekspos keluar oleh media massa merupakan cara efektif pembentukan opini publik atau masyarakat umum (dalam Ruslan, 2003:65-68).

Opini individu muncul sebagai akibat persepsi-persepsi yang timbul terhadap suatu permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Opini berdasarkan penafsiran setiap individu atau setiap orang akan berbeda pandangannya terhadap suatu masalah. Opini itu bisa setuju dan tidak setuju, atau menimbulkan pro dan kontra. Dengan demikian, baru akan diketahui bahwa ada orang-orang lain yang sependapat dan ada yang tidak sependapat dengan dia, setelah ia memperbincangkannya dengan orang lain. Jadi, opini publik itu merupakan perpaduan dari opini-opini individu.

2.3.3. Pengaruh Opini Publik

Pengaruh opini publik yang dikembangkan oleh ahli psikologi Hadley Cantril seperti yang telah diterjemahkan elvinaro, berisikan apa yang disebut *the 15 "laws of public opinion"*, yaitu :

- 1) Opini sangat sensitif terhadap berbagai peristiwa penting.
- 2) Peristiwa-peristiwa yang besar (luar biasa) dapat mengubah opini publik seketika. Opini publik itu tidak akan stabil sebelum peristiwa itu menunjukkan perkembangan yang pasti.
- 3) Opini secara umum lebih banyak ditentukan oleh peristiwa-peristiwa daripada kata-kata, kecuali kata-kata itu merupakan suatu peristiwa.
- 4) Pernyataan verbal dan tindakan penanggulangan hanya bisa dilakukan pada saat opini terbentuk dan sewaktu orang-orang masih dalam keadaan bingung dan mencari keterangan dari sumber yang kredibel (layak dipercaya).
- 5) Secara umum, opini publik tidak mengantisipasi suatu keadaan darurat, tetapi hanya bereaksi terhadap keadaan.
- 6) Opini pada dasarnya ditentukan oleh kepentingan pribadi. Berbagai peristiwa, kata-kata dan hal-hal lain hanya dapat mempengaruhi opini bila ada hubungannya dengan kepentingan pribadi (diri sendiri).
- 7) Opini tidak bisa bertahan pada suatu periode panjang (mudah berubah), kecuali jika orang-orang merasa bahwa kepentingan pribadinya benar-benar tersangkut atau jika opini yang dimunculkan oleh kata-kata diperkuat oleh suatu kejadian nyata.
- 8) Jika kepentingan pribadi sudah melekat, tidak mudah mengubah opini.

- 9) Sewaktu kepentingan pribadi sudah tersangkut, opini public dalam suatu negara demokrasi cenderung untuk mendahului atau mengarahkan kebijakan pemerintah atau pihak lain yang berwenang
- 10) Sewaktu opini didukung mayoritas yang tidak begitu kuat atau opini dibentuk tidak solid, peristiwa berikutnya mudah sekali untuk mengubah opini.
- 11) Pada saat krisis, setiap orang menjadi lebih sensitif terhadap kecakapan pemimpin mereka.
- 12) Orang-orang segan untuk menentang berbagai keputusan yang diambil oleh pemimpin mereka dalam keadaan kritis, apalagi bila mereka merasa dilibatkan dalam mengambil keputusan.
- 13) Orang-orang memiliki dan mampu membentuk opini yang ada kaitannya dengan tujuan tertentu akan lebih mudah dibandingkan dengan membentuk opini tentang metode-metode yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
- 14) Opini publik, sama halnya dengan opini individu, mengandung suatu keinginan. Apalagi opini hanya berdasarkan keinginan bukan suatu informasi, maka hak itu cenderung untuk menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap suatu peristiwa.
- 15) Semakin orang-orang melihat terhadap demokrasi karena diberinya kesempatan mengikuti pendidikan lebih tinggi dan siap mengakses informasi, maka opini publik akan mengacu kepada akal sehat dan

cenderung mengemukakan opini publik yang lebih objektif. (Elvinaro, 2003:109).

2.4. Komunikasi Massa

2.4.1. Pengertian Komunikasi Massa

Secara etimologis istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin “*communicatio*“. Istilah ini bersumber dari perkataan “*communis*” yang berarti sama. Sama yang dimaksud berarti sama makna dan arti. Jadi komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan komunikator dan diterima oleh komunikan (Effendy, 2004:30).

Menurut Harold Lasswell (Mulyana, 2005:62) cara yang terbaik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut : *Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect ?* (Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Efek Apa ?). Jawaban bagi pertanyaan paradigmatis Lasswell merupakan unsur-unsur proses komunikasi yang meliputi komunikator, pesan, media, komunikan, efek.

Defenisi komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh Bittner yakni “komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah orang besar”. Sedangkan defenisi komunikasi massa yang lebih rinci dikemukakan oleh ahli komunikasi yakni Gerbner “komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontiniu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri (Ardianto, 2004:4).

2.4.2. Dampak Komunikasi Massa

Teori komunikasi massa merupakan penjelasan atau perkiraan terhadap gejala sosial, yang berupaya untuk menghubungkan komunikasi massa kepada berbagai aspek kehidupan kultural dan personal atau sistem sosial. Teori komunikasi massa seringkali meminjam pengetahuan dari disiplin ilmu lainnya untuk menjelaskan dampak komunikasi massa. Salah satunya yaitu untuk meneliti dampak komunikasi massa pada perubahan sikap khalayak, ilmu komunikasi meminjam disiplin ilmu psikologis. Dalam bukunya, Morrisson menjelaskan bahwa komunikasi massa menyesuaikan teori-teori pinjaman ini untuk menjawab berbagai pertanyaan dan isu yang muncul dalam ilmu komunikasi.

Ada beberapa pendekatan yang diperkenalkan oleh Steven M. Chaffe dalam Wilhoit dan Horold de Book dalam (Rakhmat, 2011:216) untuk melihat dampak dari komunikasi massa. Pendekatan pertama melihat bahwa dampak komunikasi massa disebabkan karena efek pesan dan dampak media. Dalam hal ini, dampak komunikasi massa difokuskan pada pesan yang disampaikan yakni terjadi perubahan perilaku manusia setelah diterpa pesan media massa. Fokusnya pesan yang disampaikan menyebabkan dampak yang ditimbulkan pun harus berkaitan dengan pesan yang disampaikan media massa. Hal ini menimbulkan ketidaksetaraan, karena membatasi dampak hanya selama berkaitan dengan pesan media, akan mengesampingkan banyak sekali pengaruh media massa.

Pendekatan yang ketiga yakni meninjau satuan observasi yang dikenai dampak komunikasi massa seperti individu, kelompok organisasi, masyarakat, atau bangsa.

2.4.3. Unsur-Unsur Komunikasi Massa

Komunikasi massa merupakan proses yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Dengan demikian, maka unsur-unsur penting dalam komunikasi massa adalah:

1) Komunikator

- a. Merupakan pihak yang mengandalkan media massa dengan teknologi informasi modern sehingga dalam menyebarkan suatu informasi, maka informasi tersebut dengan cepat ditangkap oleh publik.
- b. Komunikator dalam penyebaran informasi mencoba berbagai informasi, pemahaman, wawasan, dan solusi-solusi dengan jutaan massa yang tersebar tanpa diketahui jelas keberadaan mereka.
- c. Komunikator juga berperan sebagai sumber pemberitaan yang mewakili institusi formal yang bersifat mencari keuntungan dari penyebaran informasi tersebut.

2) Media Massa

Media massa merupakan media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal pula. Media massa adalah institusi yang berperan sebagai agent of change, yaitu sebagai institusi pelopor perubahan. Ini adalah paradigma utama media massa yang digunakan sebagai penyampaian informasi secara massal yang disampaikan ke masyarakat.

Dalam menjalankan paradigmanya media massa berperan :

- a. Sebagai institusi pencerahan masyarakat, yaitu perannya sebagai media edukasi.
- b. Sebagai media informasi, yaitu media yang setiap saat menyampaikan informasi kepada masyarakat.
- c. Terakhir media massa sebagai media hiburan. (Bungin, 2006:85).

3) Informasi Massa

Informasi massa merupakan informasi yang diperuntukan kepada masyarakat secara massal, bukan informasi yang hanya boleh dikonsumsi oleh pribadi. Dengan demikian, maka informasi massa adalah milik publik, bukan ditujukan kepada individu masing-masing.

4) *Gatekeeper*

Merupakan penyeleksi informasi informasi. Sebagaimana diketahui bahwa massa dijalankan oleh beberapa orang dalam organisasi media massa, mereka inilah yang akan menyeleksi informasi yang akan disiarkan atau tidak disiarkan.

5) Khalayak

Khalayak merupakan massa yang menerima informasi massa yang disebarkan oleh media massa, mereka ini terdiri dari publik pendengar atau pemirsa sebuah media massa.

6) Umpan Balik

Umpan balik dalam komunikasi massa umumnya mempunyai sifat tertunda sedangkan dalam komunikasi tatap muka bersifat langsung. Akan tetapi, konsep umpan balik tertunda dalam komunikasi massa ini telah dikoreksi karena semakin

majunya teknologi, maka proses penundaan umpan balik menjadi sangat tradisional (Bungin, 2006:71).

2.4.4. Efek Komunikasi Massa

Setiap proses komunikasi mempunyai dampak atau hasil akhir yang disebut dengan efek. Efek muncul dari seseorang yang menerima pesan komunikasi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Menurut Donald K. Robert, efek hanyalah perubahan perilaku manusia setelah diterpa pesan media massa. Oleh karena itu fokus pada suatu pesan, maka efek harus berkaitan dengan pesan yang disampaikan media massa (Ardianto, 2004:48). Sedangkan menurut Effendy (2006:32), yang termasuk dalam efek komunikasi massa adalah efek kognitif (pengetahuan), efek afektif (perasaan atau emosi), dan efek konatif (perilaku)..

1) Efek Kognitif

Efek ini bersifat informatif. Misalnya saja adalah bagaimana seseorang mendapat informasi atau gambaran dari media tentang tempat yang belum pernah dikunjungi.

2) Efek Afektif

Efek ini lebih melibatkan tentang perasaan atau faktor psikologis seseorang. Misalnya setelah mendapatkan informasi melalui media massa, seseorang menjadi senang, marah, sedih, iba, terharu, gembira, sebal, dan lain sebagainya sesuai dengan informasi yang diberitakan.

3) Efek Konatif

Efek ini berakibat pada tindakan yang dilakukan sehari-hari oleh seseorang setelah menerima informasi dari media massa. Misalnya saja seorang ibu rumah tangga yang terinspirasi untuk membuka usaha kerajinan tangan di rumah setelah melihat acara *workshop crafting* melalui media.

2.4.5. Fungsi Komunikasi Massa

Fungsi dari komunikasi massa (Effendy, 2003:29-31) adalah sebagai berikut:

1) Penafsiran (*Interpretation*)

Fungsi penafsiran ini berbentuk komentar dan opini yang ditujukan kepada khalayak, serta dilengkapi perspektif (sudut pandang) terhadap berita atau tanyangan yang disajikan.

2) Pertalian (*Linkage*)

Dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam sehingga membentuk pertalian berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu yang dijadikan dasar untuk saling kerja sama.

3) Penyebaran Nilai-Nilai (*Transmission of Values*)

Dengan cara media massa itu ditonton, didengar, dan dibaca. Media massa itu memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka bertindak dan apa yang diharapkan oleh mereka.

4) Hiburan (*Entertainment*)

Berfungsi sebagai penghibur tiada lain tujuannya adalah untuk mengurangi ketegangan pikiran khalayak

5) Fungsi Informasi

Media massa berfungsi sebagai penyebar informasi bagi pembaca, pendengar, atau pemirsa untuk dijadikan bahan penyajian dalam sebuah informasi.

6) Fungsi Pendidikan

Salah satu cara media massa dalam memberikan pendidikan adalah dengan melalui pengajaran etika, nilai, serta aturan - aturan yang berlaku bagi pembaca atau pemirsa.

7) Fungsi Mempengaruhi

Secara implisit terdapat pada tajuk/editorial, *Features*, iklan, artikel dan sebagainya.

8) Fungsi Proses Pengembangan Mental

Media massa erat kaitannya dengan perilaku dan pengalaman kesadaran manusia.

9) Fungsi Adaptasi Lingkungan

Yakni penyesuaian diri terhadap lingkungan dimana khalayak dapat beradaptasi dengan lingkungannya dengan dibantu oleh media massa, ia bisa lebih mengenal bagaimana keadaan lingkungannya melalui media massa.

10) Fungsi Memanipulasi Lingkungan

Berusaha untuk mempengaruhi, komunikasi yang digunakan sebagai alat kontrol utama dan pengaturan lingkungan serta mempengaruhi masyarakat dalam lingkungan tersebut.

11) Fungsi Meyakinkan (*To Persuade*)

- Mengukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan atau nilai seseorang.
- Mengubah sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang
- Menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu.

2.5. Hukum

2.5.1. Pengertian Hukum Cambuk

Hukuman cambuk berasal dari dua kata yaitu hukuman dan cambuk. Yang dimaksud dengan hukuman di dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya, keputusan yang dijatuhkan oleh hakim atau dapat juga dikatakan dengan hukuman yaitu sanksi yang diberikan kepada seseorang yang telah melaksanakan pelanggaran hukum baik pidana dan perdata. Sedangkan cambuk yang dimaksud didalam qanun adalah: suatu alat pemukul yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 (satu) sentimeter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah. Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (2008:143).

Sedangkan hukuman cambuk dalam bahasa Arab disebut *jald* berasal dari akar kata *jalada* yang berarti memukul dikulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Jadi, hukuman ini terasa di kulit meskipun sebenarnya ia lebih ditujukan untuk membuat malu dan mencegah orang untuk berbuat kesalahan daripada menyakiti dirinya.

Hukuman cambuk juga dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 2 tentang tindak pidana perzinaan, dan surat an-Nur ayat 4 tentang tindak pidana

qadzaf (menuduh orang mukmin baik-baik berbuat zina tanpa berdasarkan bukti). Dan ada beberapa hadis tentang tindak pidana Khamar (minuman keras) dan Ta'zir (hukuman yang tidak ditentukan oleh Nash al-Qur'an maupun hadis, tetapi wewenang ulil amri, pemerintahan atau pengadilan untuk menentukannya). Jumlah cambukan untuk zina 100 kali, untuk pidana qadzaf 80 kali, dan untuk pidana miras 40 kali, bahkan pada masa Umar Ibn Khattab ditambah menjadi 80 kali dianalogikan dengan kejahatan qadzaf, yaitu orang yang mabuk dengan ketidaksadarannya dapat menuduh orang baik telah berbuat zina.

Abdul Qadir Audah (2005:73) memberikan definisi hukuman sebagai berikut:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

Artinya: “Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syarak.”

Dari definisi tersebut, dapat kita kemukakan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran (maksiat) perintah syarak.

2.5.2. Hukum Uqubah Cambuk

Uqubah cambuk merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam. Dalam Qanun Hukum Jinayat untuk jarimah hudud, hanya ada beberapa jarimah yang dikenakan uqubah cambuk, seperti zina, qazaf, dan minum khamar. Sedangkan

Untuk jarimah-jarimah takzir, uqūbah cambuk sebagai hukuman utama dikenakan kepada jarimah maisīr, khalwat, ikhtilat, liwat, musahaqah, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Perbuatan pidana yang dikenakan uqūbah cambuk dalam Qanun Jinayat Aceh nomor 6 Tahun 2014 ada sepuluh antara lain sebagai berikut:

1) Zina

Zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji (Zainuddin, 2012:37). Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 26 zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.

2) Qazaf

Qazaf adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi. Berdasarkan Alquran surat An-Nur ayat 2, maka hukum qazaf dikenakan hukuman cambuk sebanyak 80 kali sebagai bentuk hukuman pokok, dan hukuman tambahan dengan tidak diterima persaksian dari dirinya selamanya. Hukuman tersebut diberikan apabila tuduhan yang dilakukan tersebut adalah suatu kebohongan. Sebaliknya apabila tuduhannya adalah benar maka hukuman qazaf tidak dijatuhkan dan gugur dengan sendirinya.

3) Khamar

Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol 2% atau lebih. Keempat Maisir berasal dari kata yasara atau yurs yang artinya mudah, atau dari kata yasar yang berarti kekayaan.

4) Maisir

Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

5) Khalwat

Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah kepada perbuatan zina.

6) Ikhtilat

Ikhtilat adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup maupun tempat terbuka.

7) Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban, baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

8) Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku

terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

9) Liwat

Liwat adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.

10) Musahaqah

Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.

2.6. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:122) yang dimaksud hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu penelitian yang benar dan juga salah tergantung kesesuaian antara teori dengan kenyataan dan fakta di lapangan.

Adapun Hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat Opini Publik Terhadap Sanksi Hukuman Cambuk di Dinas Syariat Islam bagi Peraturan Daerah (Qanun) di Provinsi Aceh

Ha : Terdapat Opini Publik Terhadap Sanksi Hukuman Cambuk di Dinas Syariat Islam bagi Peraturan Daerah (Qanun) di Provinsi Aceh.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian sebagai sistem ilmu pengetahuan berperan penting dalam bangunan ilmu pengetahuan itu sendiri. Menurut Sugiyono (2015:14), metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. *Penelitian juga merupakan suatu proses yang panjang, berasal dari minat untuk mengetahui gejala sesuatu, selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai, dan seterusnya. Jadi, metode penelitian merupakan salah satu aspek yang berperan dalam kelancaran atau keberhasilan dalam penelitian.*

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, dimana data-data yang dikumpulkan berupa angka. Data yang berupa angka kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah di balik angka-angka tersebut. Adanya sampel merupakan salah satu alat survei oleh statistik dan dihitung dengan menggunakan rumus untuk menentukan seberapa besar ukuran sampel yang diperlukan dari suatu populasi untuk mencapai hasil dengan tingkat akurasi yang dapat diterima.

3.2. Kerangka Konsep



Tabel 3.1. Kerangka Konseptual Penelitian

3.3. Definisi Konsep

Konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Adapun definisi konsep dari penelitian adalah:

a. Opini

Opini artinya pendapat atau pandangan tentang sesuatu. Karena itu, opini bersifat subjektif karena pandangan atau penilaian seseorang dengan yang lainnya selalu berbeda.

b. Opini Publik

Opini publik adalah penilaian, pendapat, atau pandangan orang banyak yang tidak teorganisasi, tersebar dimana-mana dan karena kesamaan pandangan terhadap sesuatu mereka dapat bergerak serentak dan bersatu-padu menyikapi sesuatu tersebut.

c. Hukum Cambuk

Hukuman cambuk dalam bahasa Arab disebut jald berasal dari akar kata jalada yang berarti memukul dikulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Jadi, hukuman ini terasa di kulit meskipun sebenarnya ia

lebih ditujukan untuk membuat malu dan mencegah orang untuk berbuat kesalahan daripada menyakiti dirinya.

3.4. Definisi Operasional

Sugiyono (2011 : 61) menjelaskan bahwa variable penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

No.	Variabel Teoritis	Variabel Operasional
	Variabel Bebas (x) Opini Publik	1. <i>Affect</i> (perasaan atau emosi) 2. <i>Behaviour</i> (tingkah laku) 3. <i>Cognition</i> (pengertian atau nalar)
	Variabel Terikat (y) Sanksi Hukuman Cambuk	1. Zina 2. Qazaf 3. Khamar 4. Maisir 5. Khalwat 6. Ikhtilat 7. Pelecehan seksual 8. Pemerkosaan 9. Liwat 10. Musahaqah

Tabel 3.2. Definisi Operasional

3.5. Populasi dan Sampel

3.5.1. Pupulasi

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 117). Sedangkan menurut (Arikunto, 2013: 173) populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Jadi yang dimaksud populasi adalah individu yang memiliki sifat yang sama walaupun prosentase kesamaan itu sedikit, atau dengan kata lain seluruh individu yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian. Populasi yang diambil 982 masyarakat, untuk bertujuan diadakan populasidalam penelitian adalah agar suatu penelitian dapat mengukur sesuatu dengan kasusnya, dan tidak akan berlebihan dengan populasi yang sudah diukur agar berpengaruh terhadap penilaian yang berupa angka dalam memaksimalkan hasil penelitian ini.

3.5.2. Sampel

Arikunto (2013: 174) berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sedangkan menurut (Sugiyono, 2013: 118) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Berdasarkan data populasi yang ada, maka untuk menghitung dan menentukan ukuran sampel dari populasi, maka penelti menggunakan rumus Taro Yamane dengan presisi 10% dan tingkat kepercayaan 90%. (Rakhmat, 2007:82):

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Keterangan:

n= Jumlah Sampel

N= Jumlah Populasi

d= Nilai presisi yang ditetapkan

Berdasarkan data yang ada, maka penelitian ini memerlukan sampel sebanyak:

$$n = \frac{982}{982(0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{982}{982(0,01) + 1}$$

$$n = \frac{982}{9,82 + 1}$$

$$n = \frac{982}{10,82}$$

$$n = 90.7578 = 91 \text{ (dibulatkan)}$$

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dilakukan dengan cara penelitian ini, maka peneliti mengumpulkan data melalui:

a. *Angket/Kuesioner*

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Iskandar, 2008:77). Data yang dikumpulkan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan variabel-variabel penilaian. Bobot nilai angket yang ditentukan berdasarkan skala likert (Husaini dan Purnomo,2004:69) yaitu:

- 1) Sangat Setuju (SS) dengan nilai 1
- 2) Setuju (S) dengan nilai 2
- 3) Tidak Setuju (TS) dengan nilai 3

4) Sangat Tidak Setuju (STS) dengan nilai 4

Skala itu sendiri salah satu artinya, sekedar memudahkan, adalah ukuran-ukuran berjenjang. Skala penilaian, misalnya, merupakan skala untuk menilai sesuatu yang pilihannya berjenjang, misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Skala Likert juga merupakan alat untuk mengukur (mengumpulkan data dengan cara “mengukur-menimbang”) yang “itemnya” (butir-butir pertanyaannya) berisikan (memuat) pilihan yang berjenjang. Skala Likert bertujuan untuk mengukur kesetujuan dan ketidaksetujuan seseorang terhadap sesuatu objek.

b. *Observasi*

Dilakukan untuk melacak secara sistematis dan langsung, mengetahui gejala dan hambatan yang terjadi dalam menjalankan strategi komunikasi untuk menciptakan suasana kondusif (Pawito, 2007 :111). Metode observasi dipilih karena dengan mengamati objek penelitian peneliti bisa melihat lebih jauh dan lebih dekat cara strategi komunikasi yang baik.

c. Studi Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mengumpulkan data, mencatat, mempelajari *text book* dan buku-buku pelengkap atau referensi, seperti: jurnal, majalah dan media cetak lainnya di perpustakaan atau di tempat lainnya.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Karena metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, maka data yang di kumpulkan dalam

penelitian korelasional. Penelitian ini melihat ada atau tidaknya hubungan yang terjalin di antara kedua variabel dan bila ada, seberapa erat dan berarti atau tidaknya hubungan tersebut.

Untuk menghitung besarnya korelasi peneliti menggunakan rumus korelasi Product Moment Persons yang dikutip oleh (Rakhmat, 2010:175).

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)(n \sum y^2 - (\sum y)^2)\}}}$$

r_{xy} = Koefisien korelasi

n = Jumlah sampel penelitian

x = Variabel bebas

y = Variabel terikat

3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Sriwijaya Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang. Waktu Penelitian diperkirakan dari bulan Agustus - September 2018.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat di Desa Sriwijaya Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang . Semua responden di beri kuesioner, dimana terdapat 13 pertanyaan dari 3 pertanyaan variabel bebas (X) dan 10 pertanyaan untuk variabel terikat (Y). Setelah dilakukan penelitian dilapangan melalui penyebaran kuisisioner, maka diperoleh data tentang keadaan menurutumur dan jenis kelamin yang di sajikan dalam bentuk table. Data-data tersebut disajikan dalam bentuk analisis data dengan jumlah responden sebanyak 91 orang. Data yang diteliti diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan bentuk tabel tunggal, uji korelasi dengan rumus Product Momment Correlation.

Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden dan hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel-tabel sebagai berikut :

4.1.1. Analisis Tabel Tunggal

a. Identitas Responden

Identitas responden untuk mengetahui latar belakang responden yang menjadi langkah awal untuk menyempurnakan sebuat data agar menjadi data yang diambil lebih konkret. Adapun indentitas yang dianggap penting menurut penelitian ini meliputi jenis kelamin dan umur yang merupakan identitas responden.

Tabel 4.1

Distribusi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-Laki	51	56,05
2	Perempuan	40	43,95
Jumlah		91	100

Sumber: Angket Tahun 2018

Sesuai dengan tabel di atas diperoleh persentase tertinggi adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 51 orang atau 56,05%, sementara responden perempuan sebanyak 40 orang atau 43,95%. Dapat dilihat masyarakat yang memberikan sebuah pendapat atau opini tentang sanksi hukuman cambuk berjenis kelamin laki-laki daripada berjenis perempuan.

Tabel 4.2

Distribusi Responden Berdasarkan Usia

No	Umur	Frekuensi	Presentase
1	20 – 30 tahun	45	49,45
2	31 – 40 tahun	34	37,36
3	41 – 50 tahun	12	13,19
Jumlah		91	100

Sumber : Angket Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa dari 91 responden yang berusia 20-30 tahun berjumlah 45 orang (49,45%), yang berusia 31-40 tahun berjumlah 34 orang (37,36%) dan yang berusia 41-50 tahun berjumlah 12 orang (13,19). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden di dominasi oleh masyarakat yang berumur 31-40 tahun.

4.1.2. Analisis Data

1. Analisis data untuk Variabel (X) Opini Publik Terhadap Sanksi Hukuman Cambuk di Dinas Syariat Islam bai Peraturan Daerah (Qanun) dengan indikator:

Tabel 4.3

Distribusi jawaban responden tentang, adanya ketegasan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan terhadap opini masyarakat

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	82	90,11
2	Setuju	9	9,89
3	Tidak Setuju	0	0
4	Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah		91	100

Sumber: Angket Pertanyaan No. 1

Tabel diatas menjelaskan bahwa dari 91 responden yang menjawab sangat setuju 82 orang (90,11%), yang menjawab setuju 9 orang (9,89%), yang menjawab

tidak setuju tidak ada (0%), yang menjawab sangat tidak setuju tidak ada (0%). Hal ini berarti responden merasa bahwa ketegasan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan sangat setuju diterapkan.

Tabel 4.4

Distribusi jawaban responden tentang, apakah dengan tingkah laku seseorang akan mempengaruhi sebuah opini masyarakat

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	75	82,41
2	Setuju	16	17,59
3	Tidak Setuju	0	0
4	Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah		91	100

Sumber: Angket Pertanyaan No.2

Tabel diatas menjelaskan bahwa dari 91 responden yang menjawab sangat setuju 75 orang (82,41%), yang menjawab setuju 16 orang (17,59%), yang menjawab tidak setuju tidak ada (0%), yang menjawab sangat tidak setuju tidak ada (0%). Hal ini berarti responden merasa sangat setuju dengan tingah laku seseorang yang akan mempengaruhi sebuah opini.

Tabel 4.5

Distribusi jawaban responden tentang, apakah sebuah informasi menjadi nilai penting bagi masyarakat dalam memberikan opini

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	86	94,50
2	Setuju	5	5,50
3	Tidak Setuju	0	0
4	Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah		91	100

Sumber: Angket Pertanyaan No.3

Tabel diatas menjelaskan bahwa dari 91 responden yang menjawab sangat setuju 86 orang (94,50%), yang menjawab setuju 5 orang (5,50%), yang menjawab tidak setuju tidak ada (0%), yang menjawab sangat tidak setuju tidak ada (0%). Hal ini berarti responden merasa sangat setuju dengan adanya sebuah informasi menjadi nilai penting bagi masyarakat dalam memberikan sebuah opini.

2. Analisis data untuk Variabel (Y) Opini Publik Terhadap Sanksi Hukuman Cambuk di Dinas Syariat Islam bai Peraturan Daerah (Qanun) dengan indikator:

Tabel 4.6

Distribusi jawaban responden tentang, sebuah sanksi yang diberikan ke masyarakat apabila melakukan kegiatan bersetubuh tanpa ikatan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	51	56,05
2	Setuju	40	43,95
3	Tidak Setuju	0	0
4	Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah		91	100

Sumber: Angket Pertanyaan No.4

Tabel diatas menjelaskan bahwa dari 91 responden yang menjawab sangat setuju 51 orang (56,05%), yang menjawab setuju 40 orang (43,95%), yang menjawab tidak setuju tidak ada (0%), yang menjawab sangat tidak setuju tidak ada (0%). Hal ini berarti responden merasa sangat setuju dengan adanya sebuah sanksi yang diberikan ke masyarakat apabila melakukan kegiatan bersetubuh tanpa ikatan.

Tabel 4.7

Distribusi jawaban responden tentang, apakah responden merasa terganggu apabila menuduh seseorang berzina tanpa adanya seorang saksi mata

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	62	68,13

2	Setuju	29	31,87
3	Tidak Setuju	0	0
4	Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah		91	100

Sumber: Angket Pertanyaan No.5

Tabel diatas menjelaskan bahwa dari 91 responden yang menjawab sangat setuju 62 orang (68,13%), yang menjawab setuju 40 orang (31,87%), yang menjawab tidak setuju tidak ada (0%), yang menjawab sangat tidak setuju tidak ada (0%). Hal ini berarti responden merasa sangat setuju apabila menuduh seseorang berzina tanpa adanya seorang saksi mata.

Tabel 4.8

Distribusi jawaban responden tentang, apakah dengan kegiatan minuman yang mengandung kadar alkohol akan mendapatkan sanksi

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	75	82,41
2	Setuju	16	17,59
3	Tidak Setuju	0	0
4	Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah		91	100

Sumber: Angket Pertanyaan No.6

Tabel diatas menjelaskan bahwa dari 91 responden yang menjawab sangat setuju 75 orang (82,41%), yang menjawab setuju 16 orang (17,59%), yang menjawab tidak setuju tidak ada (0%), yang menjawab sangat tidak setuju tidak ada (0%). Hal ini berarti responden merasa sangat setuju dengan adanya sebuah sanksi yang diberikan ke masyarakat apabila meminum yang mengandung kadar alkohol.

Tabel 4.9

Distribusi jawaban responden tentang, sebuah sanksi yang diberikan ke masyarakat apabila melakukan kegiatan taruhan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	74	81,31
2	Setuju	17	19,69
3	Tidak Setuju	0	0
4	Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah		91	100

Sumber: Angket Pertanyaan No.7

Tabel diatas menjelaskan bahwa dari 91 responden yang menjawab sangat setuju 74 orang (81,31%), yang menjawab setuju 17 orang (19,69%), yang menjawab tidak setuju tidak ada (0%), yang menjawab sangat tidak setuju tidak ada (0%). Hal ini berarti responden merasa sangat setuju dengan adanya sebuah sanksi yang

diberikan ke masyarakat apabila melakukan sebuah taruhan antar desa atau yang bersifat merugikan orang lain.

Tabel 4.10

Distribusi jawaban responden tentang, sanksi yang diberikan apabila masyarakat melakukan zina yang bukan mahramnya

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	82	90,11
2	Setuju	9	9,89
3	Tidak Setuju	0	0
4	Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah		91	100

Sumber: Angket Pertanyaan No.8

Tabel diatas menjelaskan bahwa dari 91 responden yang menjawab sangat setuju 82 orang (90,11%), yang menjawab setuju 9 orang (9,89%), yang menjawab tidak setuju tidak ada (0%), yang menjawab sangat tidak setuju tidak ada (0%). Hal ini berarti responden merasa sangat setuju dengan adanya sebuah sanksi yang diberikan apabila masyarakat melakukan zina yang bukan mahramnya.

Tabel 4.11

Distribusi jawaban responden tentang, sebuah sanksi yang diberikan ke masyarakat apabila melakukan kegiatan bercumbu yang tanpa ikatan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	50	54,95
2	Setuju	41	45,05
3	Tidak Setuju	0	0
4	Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah		91	100

Sumber: Angket Pertanyaan No.9

Tabel diatas menjelaskan bahwa dari 91 responden yang menjawab sangat setuju 50 orang (54,95%), yang menjawab setuju 41 orang (45,05%), yang menjawab tidak setuju tidak ada (0%), yang menjawab sangat tidak setuju tidak ada (0%). Hal ini berarti responden merasa sangat setuju dengan adanya sebuah sanksi yang diberikan ke masyarakat apabila melakukan kegiatan bercumbu yang tanpa ikatan.

Tabel 4.12

Distribusi jawaban responden tentang, Adanya sanksi yang diberikan masyarakat apabila melakukan pelecehan seksual didepan umum

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
----	--------------------	-----------	------------

1	Sangat Setuju	75	82,41
2	Setuju	16	17,59
3	Tidak Setuju	0	0
4	Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah		91	100

Sumber: Angket Pertanyaan No.10

Tabel diatas menjelaskan bahwa dari 91 responden yang menjawab sangat setuju 75 orang (82,41%), yang menjawab setuju 16 orang (17,59%), yang menjawab tidak setuju tidak ada (0%), yang menjawab sangat tidak setuju tidak ada (0%). Hal ini berarti responden merasa sangat setuju dengan adanya sanksi yang diberikan masyarakat apabila melakukan pelecehan seksual didepan umum.

Tabel 4.13

Distribusi jawaban responden tentang, adanya sanksi hubungan seksual yang dilakukan pelaku dengan cara paksaan atau ancaman kepada korbannya

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	81	89,01
2	Setuju	10	10,99
3	Tidak Setuju	0	0
4	Sangat Tidak Setuju	0	0

Jumlah	91	100
---------------	-----------	------------

Sumber: Angket Pertanyaan No.11

Tabel diatas menjelaskan bahwa dari 91 responden yang menjawab sangat setuju 81 orang (89,01%), yang menjawab setuju 10 orang (10,99%), yang menjawab tidak setuju tidak ada (0%), yang menjawab sangat tidak setuju tidak ada (0%). Hal ini berarti responden merasa sangat setuju dengan adanya sanksi hubungan seksual yang dilakukan pelaku dengan cara paksaan atau ancaman kepada korbannya.

Tabel 4.14

Distribusi jawaban responden tentang, Sebuah sanksi yang diberikan kepada laki-laki yang bersetubuh dengan sejenisnya (laki-laki)

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	88	96,70
2	Setuju	3	3,30
3	Tidak Setuju	0	0
4	Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah		91	100

Sumber: Angket Pertanyaan No.12

Tabel diatas menjelaskan bahwa dari 91 responden yang menjawab sangat setuju 88 orang (96,70%), yang menjawab setuju 3 orang (3,30%), yang menjawab tidak setuju tidak ada (0%), yang menjawab sangat tidak setuju tidak ada (0%). Hal

ini berarti responden merasa sangat setuju dengan adanya sanksi yang diberikan kepada laki-laki yang bersetubuh dengan sejenisnya (laki-laki).

Tabel 4.15

Distribusi jawaban responden tentang, sanksi yang diberikan kepada dua wanita yang melakukan hubungan untuk mendapatkan kenikmatan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	65	71,42
2	Setuju	26	28,58
3	Tidak Setuju	0	0
4	Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah		91	100

Sumber: Angket Pertanyaan No.13

Tabel diatas menjelaskan bahwa dari 91 responden yang menjawab sangat setuju 65 orang (71,42%), yang menjawab setuju 26 orang (28,58%), yang menjawab tidak setuju tidak ada (0%), yang menjawab sangat tidak setuju tidak ada (0%). Hal ini berarti responden merasa sangat setuju dengan adanya sanksi yang diberikan kepada dua wanita yang melakukan hubungan untuk mendapatkan kenikmatan.

4.1.3. Uji Statistik

Berdasarkan tabulasi data variabel X yang terletak pada lampiran dapat di ketahui bahwa nilai tertinggi responden adalah 6 dan nilai jawaban terendah adalah 3. Nilai-nilai tersebut dipergunakan untuk mengklarifikasi data dengan

mencari jarak pengukuran (R) terlebih dahulu. Adapun nilai R adalah sebagai berikut:

$$R = \text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}$$

$$R = 6 - 3 = 3$$

Setelah jarak pengukuran R diketahui, maka dapat dicari interval (i) dengan rumus sebagai berikut :

$$i = \frac{R}{\text{Jarak Interval}}$$

$$i = \frac{3}{3}$$

$$i = 1$$

Sesudah lebar interval diketahui maka jarak tersebut dapat digunakan untuk membatasi kategori jawaban responden seperti tinggi, sedang, rendah.

Tabel 4.16

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Variabel (X)

Opini Publik

No.	Kategori	Frekuensi	Jumlah	Persentase
1	Tinggi	7 - 6	6	6,60
2	Sedang	5 - 4	36	39,56

3	Rendah	3 – 2	49	53,84
	Jumlah		91	100

Sumber: Hasil distribusi Frekuensi Variabel (X)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan dari seluruh responden yang menyatakan Opini Publik dalam kategori tinggi yaitu sebanyak 6 orang (6,60%) yang menjawab Opini Publik dalam kategori sedang yaitu sebanyak 36 orang (39,56%) yang menjawab Opini Publik dalam kategori rendah sebanyak 49 orang (53,83%).

Hal ini berarti bahwa Opini Publik termasuk dalam kedua kategori yaitu sedang dan rendah. Ini terbukti dari 91 responden memiliki perbedaan dalam menjawab Opini Publik untuk kategori tinggi dan sedang bagi Sanksi Hukuman Cambuk di Dinas Syariat Islam bagi peraturan daerah (Qanun) di Provinsi Aceh.

Berdasarkan tabulasi data variabel Y yang terletak pada lampiran dapat di ketahui bahwa nilai tertinggi responden adalah 14 dan nilai jawaban terendah adalah 10. Nilai-nilai tersebut dipergunakan untuk mengklarifikasi data dengan mencari jarak pengukuran (R) terlebih dahulu. Adapun nilai R adalah sebagai berikut:

$$R = \text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}$$

$$R = 14 - 10 = 4$$

Setelah jarak pengukuran R diketahui, maka dapat dicari interval (i) dengan rumus sebagai berikut :

$$i = \frac{R}{\text{Jarak Interval}}$$

$$i = \frac{4}{3}$$

$$i = 1,3$$

Sesudah lebar interval diketahui maka jarak tersebut dapat digunakan untuk membatasi kategori jawaban responden seperti tinggi, sedang, rendah.

Tabel 4.17

Distribusi Frekuensi jawaban Responden terhadap Variabel (Y)

Sanksi Hukuman Cambuk

No.	Kategori	Frekuensi	Jumlah	Persentase
1	Tinggi	15 – 14	3	3,30
2	Sedang	13 – 12	34	37,36
3	Rendah	11 – 10	54	59,34
	Jumlah		91	100

Sumber: Hasil distribusi Frekuensi Variabel (Y)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan dari seluruh responden yang menyatakan Sanksi Hukuman Cambuk dalam kategori tinggi yaitu sebanyak 3 orang (3,30%) yang menjawab Sanksi Hukuman Cambuk dalam kategori sedang

yaitu sebanyak 34 orang (37,36%) yang Sanksi Hukuman Cambuk dalam kategori rendah sebanyak 54 orang 59,34%).

Hal ini berarti bahwa Sanksi Hukuman Cambuk termasuk dalam kategori tinggi sebanyak 45 orang (49,45%) di Dinas Syariat Islam bagi peraturan daerah (Qanun) di Provinsi Aceh.

4.1.4. Uji Korelasi Product Moment

Untuk mengetahui ada tidaknya Opini Publik Terhadap Sanksi Hukuman Cambuk di Dinas Syariat Islam bagi Peraturan Daerah (Qanun) di Provinsi Aceh, yang sekaligus menguji kebenaran Hipotesis yang di ajukan oleh penulis, maka digunakan rumus korelasi product moment, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)(n \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Sebelum menghitung nilai r , penulis memasukkan jumlah dari keseluruhan data ke dalam tabel untuk menghitung nilai korelasi, sebagai berikut :

Tabel 4.18

Distribusi tabel perhitungan untuk mencari nilai korelasi sederhana

No	Opini Publik (X)	Sanksi Hukuman Cambuk (Y)	XY	X ²	Y ²
1	5	14	70	25	196
2	5	14	70	25	196
3	4	13	52	16	169

4	4	13	52	16	169
5	4	12	48	16	144
6	4	12	48	16	144
7	6	13	78	36	169
8	6	13	78	36	169
9	6	13	78	36	169
10	5	14	70	25	196
11	4	13	52	16	169
12	3	13	39	9	169
13	3	12	36	9	144
14	3	12	36	9	144
15	3	12	36	9	144
16	3	12	36	9	144
17	3	12	36	9	144
18	3	11	33	9	121
19	3	11	33	9	121
20	3	11	33	9	121
21	3	10	30	9	100
22	3	10	30	9	100
23	3	10	30	9	100
24	3	10	30	9	100
25	4	11	44	16	121

26	4	12	48	16	144
27	4	12	48	16	144
28	4	12	48	16	144
29	4	12	48	16	144
30	4	12	48	16	144
31	4	12	48	16	144
32	3	11	33	9	121
33	4	12	48	16	144
34	4	11	44	16	121
35	4	11	44	16	121
36	4	11	44	16	121
37	4	11	44	16	121
38	3	10	30	9	100
39	3	10	30	9	100
40	3	10	30	9	100
41	4	11	44	16	121
42	6	11	66	36	121
43	5	12	60	25	144
44	6	12	72	36	144
45	5	12	60	25	144
46	5	12	60	25	144
47	6	12	72	36	144

48	5	12	60	25	144
49	5	12	60	25	144
50	4	11	44	16	121
51	4	11	44	16	121
52	4	11	44	16	121
53	4	11	44	16	121
54	4	11	44	16	121
55	4	11	44	16	121
56	3	10	30	9	100
57	3	11	33	9	121
58	3	10	30	9	100
59	3	10	30	9	100
60	3	10	30	9	100
61	3	10	30	9	100
62	3	10	30	9	100
63	3	10	30	9	100
64	3	10	30	9	100
65	3	10	30	9	100
66	3	10	30	9	100
67	3	10	30	9	100
68	3	10	30	9	100
69	3	10	30	9	100

70	3	10	30	9	100
71	3	10	30	9	100
72	3	10	30	9	100
73	3	10	30	9	100
74	3	11	33	9	121
75	3	12	36	9	144
76	3	12	36	9	144
77	3	11	33	9	121
78	3	11	33	9	121
79	3	11	33	9	121
80	3	11	33	9	121
81	4	12	48	16	144
82	4	12	48	16	144
83	3	11	33	9	121
84	4	12	48	16	144
85	3	11	33	9	121
86	4	12	48	16	144
87	3	10	30	9	100
88	3	10	30	9	100
89	3	10	30	9	100
90	3	11	33	9	121
91	3	11	33	9	121

	$\Sigma X = 335$	$\Sigma Y = 1024$	$\Sigma XY = 3825$	$\Sigma X^2 = 1305$	$\Sigma Y^2 = 11626$
--	------------------	-------------------	--------------------	---------------------	----------------------

$$n : 91$$

$$\Sigma X : 335$$

$$\Sigma Y : 1024$$

$$\Sigma X^2 : 1305$$

$$\Sigma Y^2 : 11626$$

$$\Sigma XY : 3825$$

a. Menghitung Nilai r

$$r_{xy} = \frac{n \Sigma xy - (\Sigma x)(\Sigma y)}{\sqrt{(n \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2)(n \Sigma y^2 - (\Sigma y)^2)}}$$

$$r_{xy} = \frac{91 \times 3825 - (335)(1024)}{\sqrt{(91 \times 1305 - (335)^2)(91 \times 11626 - (1024)^2)}}$$

$$r_{xy} = \frac{348075 - 343040}{\sqrt{(118755 - 112225)(1092844 - 1048576)}}$$

$$r_{xy} = \frac{5035}{\sqrt{(6530)(44268)}}$$

$$r_{xy} = \frac{5035}{\sqrt{289070040}}$$

$$r_{xy} = \frac{5035}{17,002.05}$$

$$r_{xy} = 0,296 \text{ dibulatkan } (0,300)$$

Berdasarkan hitungan diatas, diperoleh r hitung sebesar 0,300 ini menunjukkan ada atau tidaknya hubungan antar variabel X (opini publik) dan variabel Y (sanksi hukuman cambuk), dengan nilai korelasi sebesar ini sangat kuat.

4.1.5. Uji Taraf Signifikan

Pada penelitian ini digunakan korelasi product moment ini, taraf signifikan yang ditetapkan $\alpha = 5\%$ atau 0,05

4.1.6. Uji t_{hitung} dan t_{tabel}

1). Menghitung nilai t_{hitung}

$$\begin{aligned} t_{hitung} &= \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(r)^2}} \\ &= \frac{0,300\sqrt{91-2}}{\sqrt{1-(0,300)^2}} \\ &= \frac{2,8299}{0,9539} \end{aligned}$$

$$= 2,96 \text{ dibulatkan } (3)$$

2). Menentukan nilai t_{tabel}

Nilai t_{tabel} dapat dicari dengan menggunakan tabel distribusi t dengan cara taraf signifikan $\alpha = 0,05/2 = 0,025$. Kemudian dicari t_{tabel} pada tabel distribusi t dengan ketentuan $db = n - 2$, $db = 91 - 2 = 89$. Sehingga $t_{(\alpha,db)} = t_{(0,025,89)} = 2,225$.

Untuk mengukur dan mengetahui seberapa kuat korelasi antara dua variabel dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.19

Distribusi tabel perhitungan untuk mencari nilai korelasi sederhana

No	Nilai Korelasi (r)	Tingkat Hubungan
1	0,00 – 0,199	Sangat Kuat
2	0,20 – 0,399	Kuat
3	0,40 – 0,599	Cukup
4	0,60 – 0,799	Lemah
5	0,80 – 0,999	Sangat Lemah

Sumber: Syofian (2015:337)

Berdasarkan tabel diatas diketahui (r) = 0,300, maka tingkat hubungan korelasi bernilai lemah dan sangat tidak memungkinkan terjadinya hubungan searah antara variabel x dan y .

Adanya sumbangan (kontribusi) variabel X terhadap variabel Y adalah:

$$KP = r^2 \times 100\%$$

$$= (0,300)^2 \times 100\%$$

$$= 9\%$$

Artinya pengaruh variabel X (opini publik) terhadap variabel Y (sanksi hukuman cambuk) sebesar 9%.

4.1.7. Membandingkan Nilai t_{hitung} dan t_{tabel}

Berdasarkan hasil pengujian, dalam membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel} adalah untuk mengetahui apakah H_0 ditolak atau H_a diterima.

Jika $t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_a diterima

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak

Hasil akhir yang diperoleh setelah membandingkan antara t_{hitung} dan t_{tabel} , ternyata $t_{hitung} = 3 < 2,225 t_{tabel}$, maka H_a diterima.

4.2. Pembahasan

Penelitian ini membuktikan bahwa adanya Opini Publik Terhadap Sanksi Hukuman Cambuk di Dinas Syariat Islam bagi Peraturan Daerah (Qanun) di Provinsi Aceh memiliki tingkat hubungan kuat antara variabel X dan variabel Y, dimana diketahui $(r) = 0,300$ yang sudah dirumuskan dengan menggunakan korelasi product moment. Dari 91 sampel yang sudah diuji dapat ditentukan antara opini publik (variabel X) 6,60% Opini Publik Terhadap Sanksi Hukuman Cambuk di Dinas Syariat Islam bagi Peraturan Daerah (Qanun) di Provinsi Aceh berada pada kategori tinggi, 39,56% pada kategori sedang dan 53,84% pada

kategori rendah. Adanya perbedaan diantara semua kategori menjadikan penilaian dalam menyimpulkan sebuah korelasi. Dilihat dari sanksi hukuman cambuk (variabel Y), 3,30% menyatakan berada pada kategori tinggi, 37,36% pada kategori sedang dan 59,34% pada kategori rendah. Hal ini membuktikan bahwa Sanksi Hukuman Cambuk di Dinas Syariat Islam bagi Peraturan Daerah (Qanun) di Provinsi Aceh memiliki pada kategori rendah.

Kelemahan dalam pengambilan sampel ini juga menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya pengambilan data, karena kurangnya waktu dan kesibukan setiap responden yang memiliki pekerjaan masing-masing tidak semua orang ikut terlibat dalam mendapatkan sebuah kuesioner dan hanya beberapa yang terlibat pengambilan sampel. Akhirnya penulis hanya membatasi 91 orang responden (masyarakat) yang merupakan objek penelitian penulis sebagai sampel di Desa Sriwijaya Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang yang dijadikan untuk dijadikan pengambilan data sebagian pedoman dalam pengerjaan sebuah karya ilmiah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah di simpulkan pada bab-bab sebelumnya serta hasil analisis data, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang berjudul “Opini Publik Terhadap Sanksi Hukuman Cambuk di Dinas Syariat Islam bagi Peraturan Daerah (Qanun) di Provinsi Aceh”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebuah opini publik memiliki pengaruh positif serta penilaian dan signifikan terhadap pemberian sanksi hukuman cambuk apabila masyarakat melakukan hal yang tidak dianjurkan dan melanggar sebuah peraturan daerah (Qanun) yang merupakan peraturan yang sudah ditetapkan baik pemerintahan daerah ataupun sudah diakuin Undang-Undang Dasar.
2. Sebuah sanksi hukuman cambuk yang menjadikan nilai besar, apakah peraturan tersebut benar-benar diakuin keberadaannya masyarakat dan tetap dipertahankan keasliannya yang merupakan peraturan daerah yang sudah disahkan
3. Hasil uji hipotesis yang diperoleh menunjukkan bahwa yang diajukan di terima kebenarannya. Hal ini dikarenakan setelah melakukan perhitungan statistic dengan menggunakan rumus korelasi product moment antara opini publik sebagai variabel (X) dan sanksi hukuman cambuk sebagai variabel (Y)

dengan presentasi $r_{xy} = 0,300$ dan secara keseluruhan memiliki tingkat hubungan yang kuat diantar kedua variabel.

5.2. Saran

Berdasarkan dengan hasil yang sudah disimpulkan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini berharap menjadikan bahan referensi lagi apabila ada perbedaan opini masyarakat dalam menyampaikan sebuah pesan. Karena sebuah opini publik memiliki pesan moral bagaimana masyarakat agar tidak melanggar hukum apa yang sudah dibuat di daerahnya.
2. Bagi peneliti yang ingin melanjutkan dari sudut pandang yang berbeda diharapkan bisa menyempurnakan atau menjadikannya sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjut, sehingga akan membuahkan hasil yang maksimal dan lebih baik lagi.
3. Untuk peneliti yang ingin membuat kuesioner diharapkan agar tidak langung mengaplikasikan kuesioner, tanpa memahami teori dan rumus-rumus dari masing-masing variabel apabila terjadi kesalahan atau ketidak kesesuaian. Dengan demikian diharapkan peneliti akan mengetahui dengan benar apa yang sebetulnya ingin diukur, sehingga pertanyaan yang disampaikan mudah dimengerti para kuesioner, bahkan jika perlu dapat mengubah pernyataan agar sesuai dengan tujuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 1999. *Bahasa Nusantara: Posisi dan Penggunaannya*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- Abubakar, AL Yasa. 2004. *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Audah, Abdul Qadir. 2005. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu.
- Bungin, Burhan. 2006. *Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma, dan Diskursus. Teknologi Komunikasi di masyarakat*. Jakarta: Kencana purnada Media.
- Cutlip, Scott M.,dkk. 2006. *Effective Public Relations*. Jakarta : Prenada Media.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Komunikasi Pemerintahan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu teori dan filsafat komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: Gaung Persada.
- Jefkins, Frank. 2003. *Public relations*. Edisi kelima Terjemahan (Yadin. D). Jakarta: Erlangga.
- Kasali, Renaldi. 2003. *Menajemen Publik Relations Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Bandung: Grafiti.
- Kriyantono, Rachmat. 2012. *PR Writing: Teknik Produksi Media Public Relations dan Publisitas Korporat*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Moore, Frazie. 2004. *Humas: Membangun Citra dengan Komunikasi*. Bandung Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2003. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurhadi, dkk. 2003. *Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya dalam KBK*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pelangi Aksara.
- Rakhmat, Jalaluddin.2011. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Romli, Asep Syamsul M. 2008. *Kamus jurnalistik: daftar istilah penting jurnalistik cetak, radio, dan televisi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Ruslan, Rosady. 2003. *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Soemirat, Soleh dan Elvinaro Ardianto.2003. *Dasar-Dasar Publik Relation*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Bandung: Aflabeta.
- Sunarjo, Djoenarsih S. 1997. *Opini Publik*. Yogyakarta : Liberty.
- Surahmi, Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyono. 2007. *Implementasi Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Rosda.
- Syofian, 2015. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Undang-undang Pemerintahan Aceh, Pemerintan Indonesia Memberi Otonomi Khusus bagi Provinsi Istimewa Aceh.
- Vardiansyah, Dani. 2004. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zainuddin Ali. 2012. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

LAMPIRAN

Tabulasi Data Hasil Variabel X

Opini Publik

No. Responden	No. Instrumen			Total
	1	2	3	
1	1	2	2	5
2	1	2	2	5
3	1	1	2	4
4	1	1	2	4
5	1	1	2	4
6	1	1	2	4
7	2	2	2	6
8	2	2	2	6
9	2	2	2	6
10	2	1	2	5
11	1	1	2	4
12	1	1	1	3
13	1	1	1	3
14	1	1	1	3
15	1	1	1	3
16	1	1	1	3
17	1	1	1	3
18	1	1	1	3

19	1	1	1	3
20	1	1	1	3
21	1	1	1	3
22	1	1	1	3
23	1	1	1	3
24	1	1	1	3
25	2	1	1	4
26	2	1	1	4
27	2	1	1	4
28	2	1	1	4
29	2	1	1	4
30	2	1	1	4
31	2	1	1	4
32	1	1	1	3
33	1	2	1	4
34	1	2	1	4
35	1	2	1	4
36	1	2	1	4
37	1	2	1	4
38	1	1	1	3
39	1	1	1	3
40	1	1	1	3
41	1	1	2	4

42	1	2	2	6
43	2	1	2	5
44	2	2	2	6
45	2	1	2	5
46	2	1	2	5
47	2	2	2	6
48	2	1	2	5
49	2	1	2	5
50	1	1	2	4
51	1	1	2	4
52	1	1	2	4
53	1	1	2	4
54	1	1	2	4
55	1	1	2	4
56	1	1	1	3
57	1	1	1	3
58	1	1	1	3
59	1	1	1	3
60	1	1	1	3
61	1	1	1	3
62	1	1	1	3
63	1	1	1	3

64	1	1	1	3
65	1	1	1	3
66	1	1	1	3
67	1	1	1	3
68	1	1	1	3
69	1	1	1	3
70	1	1	1	3
71	1	1	1	3
72	1	1	1	3
73	1	1	1	3
74	1	1	1	3
75	1	1	1	3
76	1	1	1	3
77	1	1	1	3
78	1	1	1	3
79	1	1	1	3
80	1	1	1	3
81	2	1	1	4
82	2	1	1	4
83	1	1	1	3
84	2	1	1	4
85	1	1	1	3

11	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	13
12	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	13
13	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	12
14	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	12
15	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	12
16	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	12
17	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	12
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	11
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	11
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	11
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
25	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
26	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	12
27	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	12
28	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	12
29	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	12
30	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	12
31	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	12
32	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	11

56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
57	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	11
58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
62	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
64	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
69	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
73	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
74	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	11
75	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	12
76	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	12
77	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	11

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Foncho Ramadhan Esa
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir : Langsa, 03 Februari 1996
Status Perkawinan : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Dusun Sedar, Desa Sriwijaya,
KotaKualasimpang, Aceh Tamiang.

Status Keluarga

Nama Ayah : Irawansyah
Nama Ibu : Yursi Ferra Bahari, S.pd.
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : Guru

Status Pendidikan

Tahun 2007 : SD Negeri 2 Sriwijaya
Tahun 2010 : SMP Negeri 1 kota Kuala Simpang
Tahun 2013 : SMA Negeri 1 Kejuruan Muda
Tahun 2014-2018 : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Komunikasi
Konsentrasi Public Relations
Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara

Demikian daftar riwayat hidup saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Terima kasih

Peneliti

Foncho Ramadhan Esa



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Unggul, Cerdas & Terpercaya
 Menjawab surat ini agar disebutkan
 dan tinggalnya

Slk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan ILMU KOMUNIKASI
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 10 APRIL2018..

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : FONCHO RAMADHAN ESA
 N P M : 1403110175
 Jurusan : ILMU KOMUNIKASI
 Tabungan sks : 137 sks, IP Kumulatif 2,79

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Opini publik terhadap sanksi hukuman cambuk di Dinas Syariah Islam bagi peraturan Daerah (daerah) di provinsi Aceh. (studi kuantitatif pada masyarakat kecamatan kota Kuala simpang Aceh tamiang).	✓ 17/4 - 2018
2	Fungsi Humas pegadaian medan dalam menjalankan slogan "mengatakan masalah tanpa soksi".	
3	strategi komunikasi Badan Baitul mal dalam mensosialisasikan kegiatan zakat, harta, kepada masyarakat kecamatan kota Kuala simpang, Aceh tamiang.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

Medan, tgl. 10 APRIL2018..

(.....)
FONCHO RAMADHAN ESA.

Ketua,

(NUR HASANAH NASUTION, S.SOS. M.IKOM)

PB: Anang Anas Azhar



Umas & Terpercaya

Surat ini agar disebutkan
lainnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 190 /SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2003 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi tertanggal **17 April 2018** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **FONCHO RAMADHAN ESA**
NPM : 1403110175
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2017 / 2018
Judul Skripsi : **OPINI PUBLIK TERHADAP SANKSI HUKUMAN CAMBUK DI DINAS SYARI'AT ISLAM BAGI PERATURAN DAERAH (QANUN) DI PROVINSI ACEH (Studi Kuantitatif Pada Masyarakat Kecamatan Kota Kuala Simpang Aceh Tamiang).**

Pembimbing : Dr. Anang Anas Azhar., M.A.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 13 Muharram 1437 H / 26 Oktober 2015 M.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa kadaluarsa tanggal: 17 April 2019.

Ditetapkan di Medan,
Pada tanggal : 01 Sya'ban 1439H
17 April 2018 M



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Cerdas & Terpercaya

Isi surat ini agar disebutkan tanggalnya

Nomor : **637/ KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2018**
Lampiran : -.-
Hal : **Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 17 Zulqa'idah 1439 H
30 Juli 2018 M

Kepada Yth,
Kepala Dinas Syari'at Islam
Kabupaten Aceh Tamiang
Provinsi Aceh
di -
Tempat

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu 'alaikum wr. wb.

Teriring salam semoga Bapak/ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **FONCHO RAMADHAN ESA**
N P M : 1403110175
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2017 / 2018
Judul Skripsi : **OPINI PUBLIK TERHADAP SANKSI HUKUMAN CAMBUK DI
DINAS SYARI'AT ISLAM BAGI PERATURAN DAERAH (QANUN)
DI PROVINSI ACEH (Studi Kuantitatif pada Masyarakat Kecamatan**





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DINAS SYARIAT ISLAM

دینس شریعة اسلام کبوفتین آجیه تمیع

Jalan Ir. H. Juanda Komplek Islamic Center, Tanah Terban, Telp. (0641) 7447173 - Kode Pos 24476

KARANG BARU

Karang Baru, 30 Agustus 2018

Nomor : 010/996
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik UMSU
di -

Tempat

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 637/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2018
Tanggal 30 Juli 2018. Hal Mohon di Berikan Izin Penelitian Mahasiswa kepada:

Nama : Foncho Ramadhan Esa
NPM : 1403110175
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2017 / 2018
Judul Skripsi : Opini Publik Terhadap Sanksi Hukuman Cambuk di Dinas
Syariat Islam Bagi Peraturan Daerah (Qanun) di Provinsi
Aceh.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian dan penggalian informasi terkait dengan judul skripsi di maksud .

Demikian di sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Pt. KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM
KABUPATEN ACEH TAMIANG



TENGGU NASPI, S.Pd

Pemangku Tk. I

NIP. 19611231 198403 1 037

SP.05.BKPSDM.800/374/2018

Tanggal : 31 Januari 2018



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Dasar & Terpercaya
 surat ini agar disebutkan
 pengalinya

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan,2018.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : FOTIHO RAMADHAN ESA
 N P M : 1403110175
 Jurusan : ILMU KOMUNIKASI

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. ..190../SK/IL.3/UMSU-03/F/2018... tanggal dengan judul sebagai berikut :

OPINI PUBLIK TERHADAP SANKSI HUKUMAN CAMBUK DI DEHA SYARIAH
 ISLAM BAGI PERATURAN DAERAH (QANUN) DI PROVINSI ACEH.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 557/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2018

Program studi : Ilmu Komunikasi
 Hari, Tanggal : Rabu, 11 Juli 2017
 Waktu : 14.00 WIB s/d. selesai
 Tempat : LAB. FISIP Gedung C UMSU
 Pemimpin Seminar : NURHASANAH NASUTTON, S.Sos, M.I.Kom

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	
1	KHAIRUL ABDI	1303110001	1 M. SAID HARAHAP, M.I.Kom	1 Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	AKTIVITAS PERUM
2	MUHAMMAD FITRA AFRIANSYAH	1203110148	1 RIBUT PRIADI, S.Sos., M.I.Kom.	1 MUHAMMAD SAID HRP, S.Sos., M.I.Kom	MAKNA FQ SURYADI DI
3	FONCHO RAMADHAN ESA	1403110175	1 Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	1 Dr. ANANG ANAS AZHAR, M.A.	OPINI PUBL SYARIA PROVINSI A
4	LUTFI RINALDI LUBIS	1403110100	1 AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom	1 PUJI SANTOSO, S.S., M.SP.	STRATEGI K SIHAR SIT
5	FEBRIKA ARPANI	1403110199	1 PUJI SANTOSO, S.S., M.SP.	1 Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom.	PENGARUH RADIO 91.8



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : FORTCHO RAMADHAN ESA
P M : 1403110175
Jurusan : ILMU KOMUNIKASI
Judul Skripsi : OPINI PUBLIC TERHADAP SANKSI HUKUMAN CAMBUK DI DINTAS SYARIAH - ISLAM BAGI PERATURAN DAERAH (QAHUM) DI PROVINSI ACEH.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	18/4-2018	Bimbingan penetapan judul.	
2.	04/6-2018	Bimbingan proposal	
3.	14/7-2018	Bimbingan setelah seminar proposal	
4.	26/7-2018	Bimbingan daftar kuesioner	
5.	28/8-2018	Bimbingan 4-5 (skripsi)	
6.	10/9-2018	Revisi Bab 4-5 (skripsi)	
7.	26/9-2018	Revisi Bab 4-5 (skripsi)	
8.	02/10-2018	Revisi Akhir BAB 4-5 (skripsi)	